



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

INSPEKTORAT

Jl. Rohana Kudus No. 44 Kampung Baru, Kota Pariaman

Telp : (0751) 93652, Fax : (0751) 91557

Pariaman, 9 Juli 2024

Nomor : 700/107/INSP/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Dokumen
Hal : Penyampaian Dokumen GAP dan GAB
Pengarusutamaan Gender Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda Kota Pariaman

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil rapat Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif, tanggal 7 Mei 2024 di ruang Rapat Wali Kota Pariaman, dengan ini disampaikan Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) Inspektorat Kota Pariaman, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan. Atas Perhatian dan Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Inspektur,

ALFIAN HARUN, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660910 198712 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

"GENDER ACTION BUDGET (GAB)"

SUB KEGIATAN TA 2025

Perangkat Daerah	:	Inspektorat
Program	:	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah- Reviu Laporan Kinerja- Reviu Laporan Keuangan- Pengawasan Desa- Monev Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
Kode Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">- 6.01.02.2.01.001- 6.01.02.2.01.002- 6.01.02.2.01.003- 6.01.02.2.01.004- 6.01.02.2.01.005- 6.01.02.2.01.007
Kinerja	:	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya pengawasan yang dapat melibatkan seluruh Auditor/PPUPD pada instansi Inspektorat
Indikator	:	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah- Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja- Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Satuan	:	<ul style="list-style-type: none">- 30 laporan- 11 laporan- 8 laporan- 5 laporan- 10 laporan- 2 dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional;
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- f. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
- g. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026

2. Gambaran Umum

- Jumlah pegawai Inspektorat berdasarkan jenis kelamin yaitu : laki-laki (29 orang) dan perempuan (23 orang)
- Jumlah orang dalam setiap tim penugasan rata-rata yaitu : audit ketaatan (6-8 orang), reuiu (5-7 orang), monev (5-10 orang).
- Persentase keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam tim yaitu : laki-laki (20-30 %) dan perempuan (70-80%)
- Pengawasan (Audit/Reuiu/Monev) yang telah dilaksanakan didominasi oleh perempuan di dalam tim.
- Sub kegiatan belum responsif gender karena permasalahan kapabilitas Auditor/PPUPD laki-laki yang dianggap kurang kompeten dalam menyelesaikan tugas.

B. Penerima Manfaat

Seluruh Auditor dan PPUPD Inspektorat Kota Pariaman

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

(1) Metode Pelaksanaan : Bertahap

(2) Tahapan Pelaksanaan :

- Menyusun SOP tentang tim penugasan yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan
- Pemantauan berkelanjutan oleh Irban dan Pengendali teknis tentang KKA Penugasan
- Peningkatan kapabilitas setiap Auditor/PPUPD baik laki-laki/perempuan agar setara secara kemampuan menyelesaikan tugas

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 Bulan (Januari-Desember 2025)

E. Biaya yang dikeluarkan

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp664.476.863,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)

Pariaman, 7 Juli 2024



ALFIAN HARUN, SE, MM

NIP. 19660910 198712 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	<p>Identifikasi Masalah Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komposisi tim penugasan audit/reviu didominasi perempuan - Auditor/PPUPD laki-laki tidak banyak terlibat dalam penugasan
Langkah 2	<p>Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peyusunan tim yang tidak merata - Auditor/PPUPD perempuan dianggap lebih kompeten dalam menyelesaikan tugas audit/reviu
Langkah 3	<p>Kerangka Kerja Logis</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impact</i> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengawasan yang dapat melibatkan seluruh Auditor/PPUPD pada instansi Inspektorat - Outcome <ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan Auditor/PPUPD baik laki-laki maupun perempuan meningkat - Output <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laki-laki dan perempuan dalam satu tim penugasan relatif sama <p>Rencana Aksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP tentang komposisi tim penugasan 2. Melakukan pembagian tugas pengawasan secara merata baik laki-laki maupun perempuan
Langkah 4	<p>Identifikasi Unit Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Irbn

No.	Pertanyaan	Hasil Reviu
1.	Bagaimana gambaran Sub Kegiatan	<p>Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Kegiatan : Persentase temuan yang selesai di tingkat tim</p> <p>Kinerja Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Keuangan - Pengawasan Desa - Monev Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK <p>Indikator Sub Kegiatan :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja - Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa - Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP <p>Satuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 % - 30 laporan - 11 laporan - 8 laporan - 5 laporan - 10 laporan - 2 dokumen <p>Perangkat Daerah Pelaksana : Inspektorat</p>
2.	<p>Apa kontribusi Sub Kegiatan ini terhadap Rencana Aksi Lima Tahun yang telah disusun?</p>	<p>Bedasarkan gambaran sub kegiatan yang telah dijelaskan pada butir 1, Sub Kegiatan ini berpotensi untuk melaksanakan Rencana Aksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impact <ul style="list-style-type: none"> -Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas • Outcome <ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya kapabilitas Auditor dan PPUPD Inspektorat • Output <ul style="list-style-type: none"> -Level Kapabilitas APIP Level 3 dan meningkatnya persentase pertumbuhan tindak lanjut temuan
3.	<p>Bagaimana kondisi Sub Kegiatan saat ini ? Apakah sudah megarusutamakan gender dari aspek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses - Partisipasi - Kontrol - Manfaat 	<p>Saat ini sub kegiatan sudah mengarusutamakan gender, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses : Laki-laki dan Perempuan memiliki akses yang sama - Partisipasi : Partisipasi perempuan lebih dominan - Kontrol : Kebijakan penyusunan tim berdasarkan sudut pandang Irban atas kemampuan perempuan lebih kompeten - Manfaat : Penerima Manfaat adalah seluruh Auditor dan PPUPD Inspektorat

4.	<p>Apa faktor penyebab/kendala belum mengarusutamakan gender?</p> <p>a.Faktor Internal b.Faktor Eksternal</p>	<p>Penyebab Sub Kegiatan belum responsif gender</p> <p>a. Faktor Internal : Auditor/PPUPD perempuan dianggap lebih kompeten dalam menyelesaikan tugas pengawasan</p> <p>b. Faktor Eksternal : Belum adanya pengawasan langsung dari Instansi Pembina/Pemerintah Daerah mengenai kinerja auditor/PPUPD per individu sehingga mewajibkan semua auditor/PPUPD baik perempuan atau laki-laki bekerja dengan beban yang sama</p>
5.	<p>Apa Rencana Aksi yang perlu dilakukan agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender?</p>	<p>Rencana Aksi agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP tentang tim penugasan yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan 2. Pemantauan berkelanjutan oleh Irban dan Pengendali teknis tentang KKA Penugasan 3. Peningkatan kapabilitas setiap Auditor/PPUPD baik laki-laki/perempuan agar setara secara kemampuan menyelesaikan tugas

Pariaman, 9 Juli 2024



ALFIAN HARUN, SE, MM

NIP. 19660910 198712 1 002